

**JEMSI:**
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Teori Partisipasi Arnstein

Jemmi Saleh¹, Muliani Sam², Andi Nilwana³

¹Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, jemmisalehbt@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, mulisamiri77@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia, andinilwana0@gmail.com

Corresponding Author: mulisamiri77@gmail.com²

Abstract: *This research aims to analyze the level of community participation in the preparation of the Local Government Work Plan (RKPD) in Sidenreng Rappang Regency based on Arnstein's ladder of participation theory. Using a quantitative descriptive approach, this study collected data through Likert scale questionnaires from 55 respondents involved in public consultation forums and sub-district development planning meetings (musrenbang). The results show that community participation is dominated by the tokenism level, particularly the consultation (77.64%) and informing (77.36%) rungs, followed by the citizen power level with a relatively good partnership rung (76.73%) but significantly decreasing at the delegated power (68.18%) and citizen control (67.09%) rungs. The non-participation level occupies the lowest position with the manipulation (47.73%) and therapy (51.27%) rungs. Frequency distribution analysis confirms these findings, with the majority of respondents expressing disagreement with manipulation (86.91%) and therapy (84.00%) practices, while showing high agreement with consultation (91.28%) and informing (90.54%) practices. These findings reflect the transformation process of community participation that has moved beyond the non-participation phase but has not yet achieved substantive participation in decision.*

Keyword: *Community Participation, Development Planning, RKPD, Arnstein's Ladder of Participation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan teori tangga partisipasi Arnstein. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner *skala likert* terhadap 55 responden yang terlibat dalam forum konsultasi publik dan musrenbang kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat didominasi oleh level *tokenism*, khususnya tangga *consultation* (77,64%) dan *informing* (77,36%), diikuti oleh level *citizen power* dengan tangga *partnership* yang cukup baik (76,73%) namun menurun signifikan pada tangga *delegated*

power (68,18%) dan *citizen control* (67,09%). Level *non-participation* menempati posisi terendah dengan tangga *manipulation* (47,73%) dan *therapy* (51,27%). Analisis distribusi frekuensi mengonfirmasi temuan ini, dengan mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktik *manipulation* (86,91%) dan *therapy* (84,00%), sementara menunjukkan persetujuan tinggi terhadap praktik *consultation* (91,28%) dan *informing* (90,54%). Temuan ini mencerminkan proses transformasi partisipasi masyarakat yang bergerak melampaui fase non-partisipasi tetapi belum mencapai partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan, RKPD, Tangga Partisipasi Arnstein.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang demokratis dan responsive terhadap kebutuhan warga. Dalam konteks Indonesia, pelibatan masyarakat telah diamanatkan secara eksplisit dalam berbagai regulasi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dijabarkan kedalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek, sehingga hasil pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi indikator dari demokrasi partisipatif dan upaya pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dan memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tantangan ini mencakup keterlibatan masyarakat yang rendah dalam forum perencanaan, ketidakseimbangan representasi, degradasi kualitas partisipasi yang cenderung seremonial, sistem umpan balik yang lemah, serta ketimpangan kapasitas partisipasi antara birokrasi dan masyarakat.

Studi terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mengungkapkan beberapa permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian. (Kalsum Hidayatullah et al., n.d.) mengidentifikasi permasalahan krusial berupa efektivitas forum musrenbang yang dipertanyakan, dimana forum yang seharusnya menjadi wadah partisipasi substantif cenderung hanya menjadi sarana legitimasi agenda pemerintah tanpa memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan. Sejalan dengan itu, (Wahyu eko prastiyo, n.d.) menyoroti kompleksitas dalam menjamin bahwa aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan antara mekanisme formal partisipasi dengan implementasi substantifnya, dimana meskipun masyarakat didengarkan, tidak ada jaminan bahwa masukan mereka akan memengaruhi kebijakan final. Kedua studi tersebut menegaskan pentingnya menganalisis tingkat partisipasi masyarakat secara komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prosedur formal dengan implementasi substantif partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang melalui penggunaan kerangka teoretis tangga partisipasi Arnstein secara komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu tahap proses perencanaan, penelitian ini menganalisis dua tahapan krusial dalam proses partisipatif, yaitu forum konsultasi publik dan musrenbang tingkat kecamatan. Forum konsultasi publik yang menjadi tahap awal dalam penyusunan RKPD merupakan aspek yang sering terlewatkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, padahal forum ini memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka awal perencanaan yang partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan analisis yang lebih terstruktur dan terukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi pada setiap anak tangga partisipasi Arnstein.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan teori tangga partisipasi Arnstein sebagai kerangka analitis. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menganalisis data dari 55 responden yang terlibat dalam forum konsultasi publik dan musrenbang kecamatan melalui kuesioner terstruktur yang terdiri dari 40 item pertanyaan berdasarkan 8 tangga partisipasi Arnstein. Pengukuran tingkat partisipasi menggunakan *skala likert* 4 poin untuk menghindari kecenderungan nilai tengah dan memperoleh respons yang lebih tegas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara level *tokenism* dan *citizen power*, serta menjadi dasar empiris untuk pengembangan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang terstruktur dan terukur terhadap tingkat partisipasi (Sugiyono, 2020). Menurut (Creswell John and Creswell David, 2023) metode deskriptif analitis sangat tepat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena social secara sistematis terhadap partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis secara mendalam pola partisipasi berdasarkan delapan tangga partisipasi Arnstein. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan data yang terukur dan dapat dibandingkan antar level partisipasi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan dan pola dominan partisipasi. Selain itu, metode ini memungkinkan generalisasi temuan dalam konteks populasi yang diteliti dengan tingkat kepercayaan yang dapat ditentukan secara statistik.

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, tahap persiapan penelitian yang meliputi penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 40 item pertanyaan berdasarkan delapan tangga partisipasi Arnstein, dengan masing-masing tangga diwakili oleh lima pertanyaan. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala likert 4 poin dikembangkan berdasarkan delapan anak tangga partisipasi Arnstein. Kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin (1-4) untuk menghindari kecenderungan nilai tengah dan memperoleh respons yang lebih tegas (Oktamia Anggraini Putri, 2022). Kedua, tahap pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner kepada 55 responden yang dipilih dari populasi peserta forum konsultasi publik dan musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. Responden terdiri dari 15 peserta forum konsultasi publik dan 40 peserta musrenbang kecamatan yang dipilih menggunakan gabungan teknik proportionate stratified sampling yaitu proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi kedalam strata (A., n.d.) dan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Ani et al., 2021). Teknik pengumpulan data ini memastikan

keterwakilan yang proporsional antara forum konsultasi publik (27,63% dari total sampel) dan musrenbang kecamatan (72,36% dari total sampel), serta memperhatikan keterwakilan berbagai unsur masyarakat. Ketiga, tahap validasi instrumen dengan melakukan uji validitas menggunakan teknik korelasi item-total dan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk memastikan keabsahan instrumen penelitian. Menurut (Anggraini et al., 2022) hal ini merupakan ukuran reliabilitas yang paling tepat digunakan ketika instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert.

Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 25 dengan beberapa tahapan analisis. Pertama, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 44 item pertanyaan (40 item untuk tangga partisipasi dan 4 item untuk faktor penentu) dengan menggunakan teknik korelasi item-total dan Cronbach's Alpha. Kedua, perhitungan skor total untuk setiap tangga partisipasi dengan menjumlahkan skor dari seluruh responden untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tangga tersebut. Ketiga, perhitungan persentase skor dengan membagi skor total yang diperoleh dengan skor maksimal yang mungkin dicapai ($\text{jumlah responden} \times \text{jumlah pertanyaan per tangga} \times \text{skor maksimal per item} = 55 \times 5 \times 4 = 1100$) dan mengalikannya dengan 100%. Keempat, interpretasi hasil berdasarkan interval persentase yang telah ditetapkan yaitu 0-25% (sangat rendah), 26-50% (rendah), 51-75% (tinggi), dan 76-100% (sangat tinggi). Kelima, analisis distribusi frekuensi untuk mengidentifikasi pola sebaran respons pada setiap tangga partisipasi, yang meliputi penghitungan frekuensi dan persentase untuk setiap kategori respons (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memvisualisasikan pola respons dan memudahkan interpretasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh bentuk partisipasi yang bersifat permintaan atau simbolis, sesuai dengan model partisipasi (Arnstein, 2007). Khususnya, masyarakat lebih banyak terlibat pada tahap konsultasi (77,64%) dan pemberian informasi (77,36%). Artinya, mereka telah mendapatkan akses terhadap informasi perencanaan dan difasilitasi untuk menyampaikan pendapat, namun belum dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, partisipasi yang berjalan bersifat prosedural dan belum bersifat substantif, karena ruang bagi masyarakat untuk benar-benar memengaruhi arah dan hasil kebijakan publik belum terwujud. Temuan ini menguatkan pola partisipasi yang bersifat semu atau hanya bersifat konsultatif tanpa ada jaminan pengaruh nyata terhadap kebijakan, seperti yang diungkapkan (Nasution et al., 2019) studi serupa di Kabupaten Lubuk Pakan. Di sana, masyarakat memang didengarkan melalui forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun aspirasi mereka jarang menjadi dasar dalam penentuan kebijakan akhir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara, di mana ruang partisipasi lebih digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif ketimbang benar-benar membuka ruang diskusi yang bermakna. Menurut teori tangga partisipasi Arnstein (1969), bentuk partisipasi seperti pemberian informasi dan konsultasi termasuk kategori tokenisme karena para partisipan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi atau mengubah pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan beberapa pandangan yang menegaskan bahwa partisipasi yang sejati hanya bisa dicapai apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi, kesempatan mengemukakan pendapat, dan kekuasaan untuk memutuskan. (Breugem et al., 2011) menambahkan bahwa partisipasi simbolis cenderung menghasilkan kebijakan yang eksklusif dan berpotensi memperkuat isolasi sosial. Secara kontekstual, kelembagaan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan birokratis dan sentralistik, yang turut

memperlemah kapasitas partisipasi warga dalam perencanaan daerah (Widianingsih & Morrell, 2007). Selain itu, kurangnya politik yang mendukung dari elit lokal maupun minimnya mekanisme akuntabilitas publik menyebabkan proses perencanaan masih dikuasai oleh logika teknokratik dan elitisme (Sheil et al., 2003). Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme partisipasi publik di tingkat lokal sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang demokratis dan inklusif.

Level *non-participation* memperoleh skor yang relatif rendah, dengan tangga *manipulation* mendapat skor 47,73% (kategori rendah) dan tangga *therapy* 51,27% (kategori tinggi). Distribusi frekuensi responden mengkonfirmasi temuan ini, dengan mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktik *manipulation* (Tidak Setuju 63,64% dan Sangat Tidak Setuju 23,27%) dan *therapy* (Tidak Setuju 70,18% dan Sangat Tidak Setuju 13,82%). Rendahnya skor pada level *non-participation* menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam paradigma pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana pendekatan yang bersifat manipulatif dan terapeutik telah jauh berkurang. Hal ini berbeda dengan temuan (Kalsum Hidayatullah et al., n.d.) yang menemukan dominasi *non-participation* dalam penyusunan RKPD di Kota Palu, dimana forum musrenbang hanya menjadi sarana legalisasi agenda pemerintah yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingginya skor pada tangga *informing* (77,36%) dan *consultation* (77,64%) diikuti oleh *placation* (73,55%) menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan upaya yang cukup baik dalam membuka ruang informasi dan konsultasi bagi masyarakat. Merujuk pada teori Arnstein, *informing* merupakan langkah awal yang penting dalam proses partisipasi karena memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan yang tersedia. Namun, Arnstein juga menekankan bahwa pada level ini, komunikasi masih bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat tanpa mekanisme umpan balik yang memadai. Tingginya skor *consultation* (77,64%) menunjukkan adanya ruang dialog dimana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, namun sebagaimana dikemukakan Arnstein, pada level ini belum ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan memengaruhi keputusan akhir.

Level *citizen power* menunjukkan pola yang menarik, dengan tangga *partnership* memperoleh skor cukup tinggi (76,73%, kategori sangat tinggi), namun terjadi penurunan pada *delegated power* (68,18%) dan *citizen control* (67,09%) yang keduanya masuk kategori tinggi. Pola penurunan *gradual* dari *partnership* ke *citizen control* ini menunjukkan adanya tantangan dalam transisi dari kemitraan menuju pemberian kendali yang lebih besar kepada masyarakat. Arnstein menjelaskan bahwa *partnership* merupakan level di mana kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan. Tingginya skor *partnership* mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang, telah terbentuk kemitraan yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, rendahnya skor *delegated power* dan *citizen control* menunjukkan masih adanya keengganan untuk memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Arnstein

Tangga Partisipasi	Total Skor	Persentase	Kategori
<i>Manipulation</i>	525	47,73%	Rendah
<i>Therapy</i>	564	51,27%	Tinggi
<i>Informing</i>	851	77,36%	Sangat Tinggi
<i>Consultation</i>	854	77,64%	Sangat Tinggi
<i>Placation</i>	809	73,55%	Tinggi
<i>Partnership</i>	844	76,73%	Sangat Tinggi
<i>Delegated Power</i>	750	68,18%	Tinggi

<i>Citizen Control</i>	738	67,09%	Tinggi
------------------------	-----	--------	--------

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2024

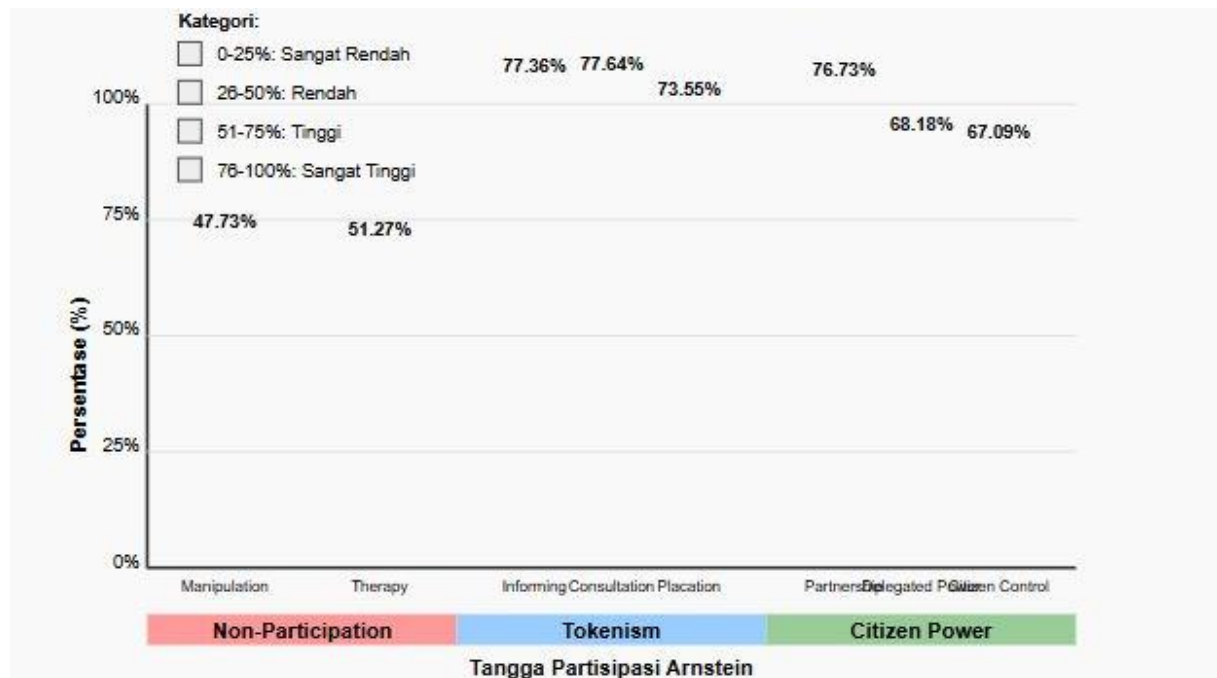
Tabel 1 menunjukkan distribusi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan model tangga partisipasi Arnstein. Data memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi yang paling dominan berada pada tingkat tokenism, khususnya pada tahapan consultation dengan persentase sebesar 77,64% dan informing sebesar 77,36%. Keduanya dikategorikan dalam tingkat partisipasi “Sangat Tinggi”, namun masih belum mencerminkan bentuk partisipasi yang ideal secara substantif. Dalam konteks model Arnstein, tokenism merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada akses informasi dan konsultasi, tanpa jaminan bahwa pandangan atau aspirasi masyarakat akan diterjemahkan ke dalam keputusan kebijakan yang final. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKPD cenderung bersifat prosedural, di mana mekanisme pelibatan masyarakat dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif daripada sebagai ruang deliberatif yang memberi pengaruh nyata.

Meskipun ada indikasi peningkatan keterlibatan masyarakat pada tingkat citizen power seperti pada kategori partnership (76,73%), delegated power (68,18%), dan citizen control (67,09%), skor ini masih lebih rendah dibandingkan dengan skor partisipasi pada level tokenism. Hal ini mengindikasikan bahwa peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik masih dibatasi. Pada tingkat partnership, masyarakat mulai dilibatkan dalam proses dialog bersama pemerintah, tetapi relasi kekuasaan belum setara. Sementara pada delegated power dan citizen control, yang dalam kerangka Arnstein seharusnya mencerminkan transfer kewenangan yang lebih kuat kepada masyarakat, implementasinya belum optimal dan cenderung masih bersifat parsial. Skor yang belum mencapai ambang sangat tinggi pada kategori-kategori ini memperlihatkan bahwa kendali pengambilan keputusan strategis masih banyak berada di tangan aktor birokrasi atau elite politik lokal.

Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat pada level paling rendah, yakni manipulation (47,73%), menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang bersifat manipulatif dan bertujuan untuk menciptakan legitimasi semu mulai ditinggalkan. Hal ini patut diapresiasi sebagai indikator positif bahwa dinamika perencanaan pembangunan daerah mulai beranjak dari pendekatan top-down yang sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Namun demikian, partisipasi pada tahap therapy (51,27%) masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian pendekatan partisipatif masih dilandasi logika paternalistik, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek untuk “dibina” ketimbang sebagai subjek yang setara dalam merumuskan arah pembangunan. Demikian pula, skor placation (73,55%) mencerminkan adanya pengakuan formal terhadap suara masyarakat, tetapi kewenangan aktual untuk mempengaruhi keputusan tetap terbatas.

Dengan Demikian, distribusi skor pada tabel menunjukkan bahwa meskipun proses partisipasi publik dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalami kemajuan, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan ruang konsultasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan model partisipasi ideal yang ditandai dengan adanya transfer kekuasaan dan pengaruh riil terhadap keputusan kebijakan. Kecenderungan partisipasi yang tinggi di level tokenism menunjukkan bahwa proses perencanaan masih lebih diarahkan untuk melegitimasi keputusan yang telah ditentukan, ketimbang membangun forum deliberatif yang sejati. Jika pemerintah daerah berkomitmen pada penguatan demokrasi partisipatoris, maka perlu ada reformasi pada struktur perencanaan, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam artikulasi kepentingan hingga perbaikan mekanisme umpan balik dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi sejati mensyaratkan tidak hanya keterlibatan dalam bentuk

kehadiran atau penyampaian pendapat, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah hasil kebijakan sesuai aspirasi masyarakat.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Arnstein

Sumber: Data Hasil Penelitian (diolah), 2024

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara level *tokenism* yang dominan dengan level *citizen power* yang lebih rendah. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam transformasi dari partisipasi simbolis menuju partisipasi substantif. Menurut Arnstein, transformasi ini menuntut perubahan fundamental dalam distribusi kekuasaan, yang seringkali sulit diwujudkan karena berbagai faktor struktural dan kultural. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Zulfila, 2023) yang mengungkapkan bahwa meskipun forum partisipasi telah dilaksanakan secara rutin, kualitas partisipasi masih rendah dan sering kali hanya menjadi formalitas karena berbagai hambatan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan dominasi elit dalam pengambilan keputusan.

Analisis terhadap karakteristik responden juga memberikan perspektif tambahan dalam memahami pola partisipasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ketimpangan gender dalam responden (65,45% laki-laki vs 34,55% perempuan) menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi berbasis gender. Dominasi ASN (56,36%) dan responden berpendidikan tinggi (81,82% Sarjana dan Pascasarjana) menunjukkan adanya ketidakseimbangan representasi yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memastikan keterwakilan yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang telah bergerak melampaui *non-participation* menuju *tokenism* dan *partnership*, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan *delegated power* dan *citizen control*. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi bertahap untuk menjembatani kesenjangan antara *tokenism* dan *citizen power*, dengan memperhatikan kesiapan semua pihak dan membangun fondasi kapasitas dan kepercayaan yang diperlukan.

Dalam teori partisipasi Arnstein, yang menarik perhatian adalah adanya pola penurunan kekuasaan secara bertahap dari tahap *partnership* menuju *citizen control*. Temuan ini

menunjukkan bahwa di Indonesia, proses melibatkan masyarakat secara aktif dan redistribusi kekuasaan yang benar-benar nyata tidak selalu berjalan mulus. Semakin tinggi tingkat partisipasi yang mengharuskan masyarakat memegang kendali, tantangan yang muncul pun makin besar, baik dari segi struktur, budaya, maupun lembaga. Kalau kita lihat di tangga partisipasi Arnstein, citizen power yang mencakup partnership, delegated power, dan citizen control itu dianggap sebagai bentuk partisipasi yang paling ideal (Chawa et al., 2023), dimana masyarakat ngg cuma didengar, tapi juga ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, temuan ini nunjukin bahwa meskipun sudah mulai ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lewat partnership, perjalanan menuju citizen control nggak selalu berjalan lancar dan seringkali mengalami penurunan, itu karena adanya resistensi terhadap distribusi kekuasaan secara lebih mendalam.

Arnstein (1969) mengembangkan model partisipasinya dari pengalaman masyarakat perkotaan di Amerika Serikat zaman 1960-an, di mana suasana politik saat itu penuh ketegangan rasial, tuntutan hak sipil, dan tekanan agar sistem representasi formal diperbaiki. Ketika model ini diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, tentu saja butuh penyesuaian dan reinterpretasi yang melibatkan kondisi lokal. Budaya politik Indonesia yang cenderung paternalistik, struktur birokrasi yang hierarkis, serta kekuatan pengaruh elit lokal dalam pengambilan keputusan semuanya menjadi hambatan buat memajukan transisi dari partisipasi yang cuma simbolik ke partisipasi yang lebih berdampak. Dalam budaya politik yang masih kuat dengan pola patron-klien, mentransfer kekuasaan ke masyarakat sering dianggap bukan cuma sebagai ancaman terhadap kekuasaan pemerintah, tapi juga karena dianggap nggak efektif, apalagi kepercayaan terhadap kemampuan rakyat ngurusin urusan publik itu sendiri masih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa memberi ruang formal seperti forum musrenbang buat masyarakat nggak otomatis bikin kekuasaan jadi sama rendah. Padahal secara aturan, peraturan perencanaan pembangunan sebenarnya udah memuat prinsip-prinsip partisipasi, tapi di lapangan, masyarakat cuma jadi pendengar atau cuma hadir tanpa punya kekuasaan buat mempengaruhi kebijakan. Jadi, partisipasi yang terjadi cenderung cuma simbolik semu, di mana orang hadir secara fisik tapi nggak punya hak buat menentukan arah kebijakan. Ini sesuai dengan apa yang Gaventa: 2006 (Roy, 1896) sebut sebagai 'ruang partisipasi yang diundang' (invited spaces), yaitu ruang-ruang yang dibentuk pemerintah, tapi dengan aturan dan batasan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau mau berubah jadi partisipasi yang nyata di Indonesia, harus ada perubahan di tiga tingkat utama: struktural, budaya, dan praksis. Secara struktural, perlu ada desain ulang institusi yang mendukung diskusi publik yang serius, bukan cuma konsultasi simbolik. Dari sisi budaya, masyarakat harus dibangun kesadaran kritis, agar mereka nggak cuma jadi penerima kebijakan, tapi juga jadi agen aktif yang bisa mengubah keadaan sosial. Secara praksis, pemimpin daerah harus menunjukkan komitmen politik buat buka akses info, jaga transparansi proses perencanaan, dan ciptakan mekanisme umpan balik yang memungkinkan warga buat menilai dan memengaruhi kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Jadi, partisipasi yang benar-benar nyata nggak bisa cuma asal aturan formal, tapi harus tumbuh dari praktik demokrasi yang hidup dan dialogis antara negara dan rakyatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh level *tokenism*, khususnya tangga *consultation* (77,64%) dan *informing* (77,36%), sementara level *citizen power* menunjukkan *partnership* yang cukup baik (76,73%) namun mengalami penurunan signifikan pada *delegated power* (68,18%) dan *citizen control* (67,09%). Level *non-participation* menjadi yang terendah dengan *manipulation* (47,73%) dan *therapy* (51,27%). Pola ini menunjukkan adanya pergeseran positif dari *non-participation* menuju partisipasi yang

lebih substantif, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mewujudkan partisipasi pada level *citizen power*. Dominasi level tokenism mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi, belum ada jaminan bahwa aspirasi tersebut akan mempengaruhi keputusan akhir dalam penyusunan RKPD. Distribusi frekuensi responden juga mengkonfirmasi temuan ini, dimana ketidaksetujuan yang signifikan terhadap *delegated power* (31,27%) dan *citizen control* (33,82%) mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural dalam pelimpahan kekuasaan dan kontrol kepada masyarakat. Pola penurunan gradual dari *partnership* ke *citizen control* menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembagian kekuasaan yang diharapkan, semakin besar pula tantangan dalam implementasinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya aplikasi tangga partisipasi Arnstein dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dengan mengidentifikasi pola "penurunan gradual kekuasaan" (*gradual decline of power*) dari *partnership* ke *citizen control*, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Temuan ini menyoroti kompleksitas dalam transisi dari *tokenism* menuju *citizen power* dan mengindikasikan perlunya rekonseptualisasi teori partisipasi Arnstein dalam konteks lokal Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menyediakan data empiris yang komprehensif tentang tingkat partisipasi masyarakat pada dua tahapan krusial dalam penyusunan RKPD: forum konsultasi publik dan musrenbang kecamatan. Informasi ini dapat menjadi baseline data bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Metodologi pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diadopsi oleh daerah lain untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks mereka masing-masing.

REFERENSI

- A., F. (n.d.). *teknik stratified random sampling*.
- Anggraini, F. D. P., Aprianti, A., Setyawati, V. A. V., & Hartanto, A. A. (2022). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6491–6504. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3206>
- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado the Influence of Brand Image, Promotion and Service Quality on Consumer Purchase Decisions on Tokopedia E-Commerce in Manado. 663 *Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Arnstein, S. R. (2007). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, November 2012, 415–423. <https://doi.org/10.4324/9781315255101-34>
- Breugem, C. C., Stewart, K. J., & Kon, M. (2011). International Trends in the Treatment of Microtia. *Journal of Craniofacial Surgery*, 22(4), 1367–1369. <https://doi.org/10.1097/SCS.0b013e31821c9464>
- Chawa, A. F., Putra, M. H. P., & Saputra, A. R. (2023). Partisipasi Warga pada Penanganan Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dalam Tangga Partisipasi Arnstein di Bogoarum, Magetan. *Jurnal Kawistara*, 13(1), 34. <https://doi.org/10.22146/kawistara.84329>
- Creswell John and Creswell David. (2023). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.: Vol. Sixth Edit* (Issue 1).
- Kalsum Hidayatullah, F., Kurnia, I., & Ferianto, F. (n.d.). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kota Palu*.
- Nasution, S. H., Tarmizi, H. B., & Purwoko, A. (2019). Participation Analysis of the Indonesian Advisory Agency Communication (BKPRMI) in Musyawarah Development Planning (Musrenbang) Village in the District *International Journal of Research and*

- Review, 6(February), 288–302.
<https://www.academia.edu/download/63525265/IJRR004020200604-17119-1etlwj0.pdf>
- Oktamia Anggraini Putri. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(20), 1349–1358.
- Roy, D. (1896). Optic nerve atrophy of obscure spinal origin. *Journal of the American Medical Association*, XXVII(18), 943–948. <https://doi.org/10.1001/jama.1896.02430960015001d>
- Sheil, D., Liswanti, N., Heist, M. van, Basuki, I., Syaefuddin, Samsedin, I., Rukmiyati, & Sardjono, M. A. (2003). Local priorities and biodiversity. *ITTO Tropical Forest Update*, 13(1), 16–18.
http://sfx.library.wur.nl:9003/sfx_local?sid=SP:CABI&id=pmid:&id=&issn=1022-5439&isbn=&volume=13&issue=1&spage=16&pages=16-18&date=2003&title=ITTO Tropical Forest Update&atitle=Local priorities and biodiversity%252e&aulast=Sheil&pid=%253CAN%253E2003306471
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wahyu eko prastiyo. (n.d.). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Teweh Tengah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Baroto Utara Tahun 2016*.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121320>
- Zulfila. (2023). *Analisis Partisipasi MasyarakatT Dalam Musrenbangdes (Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)*.